

# PENGARUH KOMITMEN KEPALA DAERAH DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI ACEH

Mahlil <sup>\*1</sup>, M. Rizal Yahya <sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala  
e-mail: [mahlirazali@gmail.com](mailto:mahlirazali@gmail.com) <sup>\*1</sup>

## *Abstract*

*The study is aimed to explain the influence of head of local authority and accountancy knowledge regarding to the quality of financial report, in which, measurement in financial report includes reliability, relevancy, understandability and comparability. This study was conducted for Aceh's representations of BPK-RI auditors who have audited financial reports of Aceh Government. The targeted population in the study was Aceh's representations of BPK-RI auditors as many as 60 subjects. The type of data that used in the study was primary data taken through questionnaires that directly distributed to the subjects. Meanwhile, the hypothesis that used is tested by doubled linear regression analysis. As a result, through statistical testing and data tabulation via SPSS, it shows that the commitment of head of local authority and accountancy knowledge influenced to the quality of local government reports on finance in Aceh Province..*

**Keywords:** *Head of local authority, accountancy knowlegde and quality of financial reports.*

## **1. Pendahuluan**

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan Good Government Governance (GGG), diantaranya sejak tahun 2003 telah dikeluarkan paket Undang-Undang (UU) pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diamanatkan dalam ketiga UU pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan yang mengandung prinsip GGG terutama transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut

adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Dalam proses mendukung pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diberlakukan UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi pembuatan laporan keuangan adalah salah satu syarat penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka Good Government Governance (GGG) dan pertanggungjawaban seluruh aktivitas pengelolaan sumberdaya publik, laporan keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 yang merupakan turunan dari UU no. 22 tahun 1999 menyebutkan secara tegas bahwa laporan

pertanggungjawaban keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU no. 17 tahun 2003, UU no. 1 tahun 2004. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah diterima baik pusat maupun daerah. Penggunaan laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK). Disini dibutuhkan pengetahuan akuntansi yang baik dari pihak pemerintah sebagai penyusun laporan keuangan, agar setiap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah baik daerah maupun pusat bisa dengan baik oleh masyarakat, akademis sebagai pengguna laporan keuangan tersebut dan pihak BPK sebagai auditor dalam memeriksa laporan keuangan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah laporan keuangan menurut SAP.

Fenomena di Provinsi Aceh menurut siaran web yang disampaikan, Aceh Terkini yang di tulis pada tanggal 28 juli 2013 ternyata sudah 5 tahun dari tahun 2008 hingga 2012 berturut-turut mendapatkan hasil opini auditor BPK WDP (wajar dengan pengecualian), dan opini yang terakhir di tahun 2013 Provinsi Aceh masih medapatkan opini yang sama dari BPK yaitu WDP, di sini timbul pertanyaan peneliti apakah tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah, atau pemerintah Aceh sudah puas dengan hasil WDP yang di berikan BPK, atau tidak ada keseriusan dan komitmen dari pemegang kekuasaan di Provinsi aceh untuk menidak lanjuti hasil audit tersebut.

Disinilah tugas dan komitmen dari pemegang kekuasaan dilihat untuk mendorong organisasinya menjadi lebih baik kedepannya. Komitmen organisasi akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasinya ( Angel dan Perry, 1981; porter el. al., 1974 dalam Mayangsari 2009). Komitmen yang kuat dari kepala daerah akan mendorong seluruh unsur di dalam organisasi tersebut untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Fenomena lain di Provinsi Aceh mengenai pemberian opini BPK menurut Taufik el al (2014) dalam jurnalnya adalah, masih terdapatnya laporan keuangan kabupaten/kota Tahun 2012 yang mendapat

opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2012 yang telah diaudit oleh BPK, ditetapkan bahwa hanya 7 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang menerima opini WTP dari total 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sebanyak 14 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Aceh masih mendapat predikat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK.

Disini masih terlihat masih sangat rendah daerah di Provinsi Aceh yang masih mendapat predikat opini WTP disini timbul lagi pertanyaan dari peneliti tentang komitmen dan pengetahuan di tingkat SKPD di Provinsi Aceh masih mendapat apresiasi yang rendah. Menurut Suaedy (2011) pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

## **2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Hipotesis**

### **2.1 Hubungan Kepala Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan**

LKPD yang belum mendapatkan opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan seluruh jajarannya. Terkait opini LKPD, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. “Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. (Kurniawan, 2011)

Menurut Rezaee (2003) perusahaan harus mengembangkan sebuah model "the six legged stool" yang mendukung pertanggungjawaban dan keandalan laporan keuangan. Setiap peserta dalam proses merupakan “one legged stool”, mendukung salah satu tujuan yaitu menghasilkan laporan berkualitas tinggi. The six legged stool model didasarkan pada partisipasi aktif dari semua pihak dan mendorong perbaikan berkelanjutan, terdiri dari : 1) Board of Director, 2) Top Management Team 3) Audit Internal; 4) External Audit; 5) Governing Bodies. Menyelaraskan kepentingan manajer dan stakeholder membutuhkan kewaspadaan, independensi, dan keefektifan dewan.

Dewan direksi tidak terlibat dalam kegiatan rutinitas manajemen, namun memiliki peran unik untuk mengawasi, memantau, dan mengendalikan kegiatan manajemen.

Dewan harus memantau rencana manajemen, keputusan, dan kegiatan dan bertindak secara independen. Tone yang ditetapkan oleh dewan direksi biasanya mempengaruhi perilaku orang lain dalam perusahaan. Dewan direksi yang tidak efektif akan menyebabkan penipuan laporan keuangan mungkin terjadi. Sebuah dewan dapat tidak efektif ketika manajemen mengesampingkan tanggung jawab pemantauan dewan. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang dimasukkan dalam unsur penilai kinerja manajer dapat mendorong temuan audit dapat diselesaikan. (Trihartono, 2006).

## 2.2 Hubungan Pengetahua Akuntansi Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Pengetahuan akuntansi diperlukan dari proses RKA sampai tahap APBD disusun dengan satandar-satandar akuntansi keuangan sektor publik dan sampai dengan proses pelaksanaan APBD kepala daerah dituntut memiliki pengetahuan untuk memudahkan melakukan fungsi kontrol terhadap APBD yang berjalan. hiangga pada tahap akhirnya kepala daerah harus mempertanggungag jawabkan anggaran yang dikelolanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban keuangan daerah harus dibuat mengikuti standar akuntansi yang berlaku, disini penting pengetahuan akuntansi agar mewujudkan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Semua proses perencanaan, pelaksanaa sampai pertanggungjawaban ini membutuhkan pengetahuan akuntansi yang baik untuk menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan handal yang siap di audit oleh BPK dan memdapatkan opini BPK yang terbaik, yaitu WTP.

## 2.3 Hipotesis

Menurut Berdasarkan kajian pustaka, kerangka pemikiran yang telah di uraikan maka hipotesis dalam penlitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh.
- 2) Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh.
- 3) Komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Yang berjumlah 60 orang (Sumber BPK RI Perwakilan Provisi Aceh per 31 Oktober 2014).

**Tabel 3.1**

**Data Pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Aceh Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pemeriksa Utama	0
2	Pemeriksa Madya	0
3	Pemeriksa Muda	33
4	Pemeriksa Pertama	27
<b>JUMLAH</b>		<b>60</b>

Sumber: BPK RI Perwakilan Provisi Aceh per 31 Oktober 2014

### 3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama/responden oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (sekaran, 2006:60). Pengumpulam data dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor BPK RI perwakilan Provinsi Aceh yang terlibat dalam mengaudit 23 PEMDA di Provinsi Aceh pada tahun

anggaran 2013.

### 3.3 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini komitmen kepala daerah (X1) dan pengetahuan akuntansi (X2) dan variabel Independen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh (Y).

### 3.4 Metode Analisis

Data Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Alat analisis ini digunakan karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu ingin menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen yang diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Metode analisis regresi berganda dipandang mampu menghubungkan lebih dari satu variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu model prediktif tunggal. Secara matematis bentuk regresi linear berganda tersebut sebagai berikut (Gujarati, 2006:130):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kualitas laporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Komitmen kepala daerah
- X<sub>2</sub> = Pengetahuan Akuntansi
- $\beta_1, \beta_2$  = Nilai koefisien regresi
- $\epsilon$  = Epsilon (error term)

## 4. Hasil Dan Pembahasan

### 4.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji korelasi Pearson Product-Moment dengan bantuan software computer melalui SPSS 22. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (N=35), maka didapat r tabel sebesar 0,334.

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk seluruh item pernyataan lebih dari 0,334 dan dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid

### 4.2 Pengujian Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas terhadap instrument penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* ( ) dengan bantuan *software computer* melalui SPSS 22. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antar skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Jogiyanto, 2008:141).

Berdasarkan hasil analisis terhadap semua item pernyataan yang sebelumnya telah valid dalam uji validitas menunjukkan semua item variabel tersebut reliabel karena koefisien alpha masing-masing variabel > 0.60.

### 4.3 Hasil Analisis dan Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Persamaan Regresi Linear Berganda		
$Y = 1,146 - 0,400X_1 + 0,304X_2$		
Nama Variabel	B	Standar Error
Konstanta ( $\alpha$ )	1,146	0,649
Komitmen Kepala daerah( $X_1$ )	0,400	0,155
Pengetahuan Akuntansi( $X_2$ )	0,304	0,137
Koefisien korelasi (R) = 0,625 <sup>a</sup>	a. <i>Predictors:</i> ( <i>Constant</i> ), Komitmen Kepala daerah, Pengetahuan Akuntansi	
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,391	b. <i>Dependent Variable:</i> Kualitas Laporan Keuangan	

(Sumber: Data diolah 2015)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang terdapat pada Tabel 4.8, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Koefisien Regresi
  - Konstanta sebesar 1,146 artinya jika komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi dianggap konstan maka besarnya

nilai kualitas laporan keuangan SKPD sebesar 1,146.

- Koefisien regresi komitmen kepala daerah ( $\beta_1$ ) sebesar 0,400 menunjukkan arah positif yang artinya jika Kepala daerah meningkatkan komitmen sebesar 1%, maka kualitas laporan keuangan SKPD akan meningkat sebesar 40%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).
- Koefisien regresi pengetahuan akuntansi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,124 menunjukkan arah positif yang artinya jika kepala daerah meningkatkan pengetahuan akuntansi sebesar 1%, maka kualitas laporan keuangan SKPD akan meningkat sebesar 12,4%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

#### 2) Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

- Koefisien korelasi (R) sebesar 0,625 menunjukkan korelasi antara variabel motivasi dan objektivitas dengan variabel kualitas audit termasuk dalam kategori tinggi ( $R > 0,40 =$  tinggi).
- Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,391 berarti bahwa 3,91% variasi variabel kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi, sedangkan sisanya sebesar 96,09% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1) Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan

Berdasarkan Untuk menguji apakah komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, didasarkan pada rancangan pengujian hipotesis bahwa jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $P_{value}$  (nilai signifikansi)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima (H ditolak) dan jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $P_{value}$  (nilai signifikansi)  $< 0,05$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang terdapat pada Lampiran 8 untuk uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 10,264 (lihat pada tabel ANOVA), dan  $F_{tabel}$  dapat dicari pada tabel statistik dengan

signifikansi 0,05, maka  $df_1 = k-1$  atau  $3-1 = 2$ , dan  $df_2 = n-k$  atau  $35-3 = 32$  (k adalah jumlah variabel). Di dapat  $F_{tabel}$  sebesar 5,366. Dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} (0,000) < F_{tabel} (5,366)$  maka  $H_0$  diterima (H ditolak) yaitu komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LKPD. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang terdapat pada Lampiran 8 untuk P value (nilai signifikansi) diperoleh dari tabel ANOVA dapat diketahui probabilitas sebesar 0,000. Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepladaerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

##### 2) Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial

Berdasarkan Untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji parsial. Yaitu jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau  $P_{value}$  (nilai signifikansi)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima (H ditolak) dan jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau  $P_{value}$  (nilai signifikansi)  $< 0,05$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap variabel komitmen kepala daerah ( $X_1$ ) yang terdapat pada Lampiran 8 untuk uji T diperoleh  $T_{hitung}$  sebesar 2,579 (lihat pada tabel coefficients), dan  $T_{tabel}$  dapat dicari pada tabel statistik dengan signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi), maka  $df = n-k-1$  atau  $35-2-1 = 32$  (k adalah jumlah variabel independen). Di dapat  $T_{tabel}$  sebesar 2,036. Dapat diketahui bahwa  $T_{hitung} (2,579) > T_{tabel} (2,036)$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang terdapat pada Lampiran 8 untuk P value (nilai signifikansi) diperoleh dari tabel coefficients dapat diketahui probabilitas sebesar 0,015. Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,015 < 0,05$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap variabel pengetahuan akuntansi ( $X_2$ ) yang terdapat pada Lampiran 8 untuk uji T diperoleh  $T_{hitung}$  sebesar 2,212 (lihat pada tabel coefficients),

dan T tabel dapat dicari pada tabel statistik dengan signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi), maka  $df = n-k-1$  atau  $35-2-1 = 32$  (k adalah jumlah variabel independen). Di dapat T tabel sebesar 2,036. Dapat diketahui bahwa T hitung ( $2,212$ ) < T tabel ( $2,036$ ) maka  $H_0$  diterima (H ditolak) yaitu komitmen kepala daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang terdapat pada Lampiran 8 untuk P value (nilai signifikansi) diperoleh dari tabel coefficients dapat diketahui probabilitas sebesar 0,034. Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,034 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima (H ditolak) yaitu pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

## 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.5.1 Pengaruh Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk uji F dapat diketahui bahwa F hitung ( $10,264$ ) > F tabel ( $5,366$ ) maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, serta untuk P value (nilai signifikansi) diperoleh dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan dengan Silviana (2012) yang menyatakan bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh secara signifikan terhadap LKPD, dan juga penelitian yang dilakukan Amy Fontanella (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan-laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada pengaruh positif komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama terhadap laporan keuangan SKPD yang didasari pada penelitian kepada auditor BPK-RI perwakilan

Provinsi Aceh, komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD jadi diharapkan kepala daerah meningkatkan komitmen dan pengetahuan akuntansi agar terwujudnya laporan keuangan SKPD yang berkualitas dan handal. Lebih jauh peneliti menganjurkan agar penentu kebijakan seperti kepala daerah perlu terus menjaga dan meningkatkan komitmen dan pengetahuan melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan pendidikan profesi terhadap pengetahuan akuntansi agar dapat melakukan fungsi pengawasan yang baik terhadap LKPD.

### 4.5.2 Pengaruh komitmen kepala daerah terhadap Kualitas laporan keuangan SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk uji T dapat diketahui bahwa T hitung ( $2,579$ ) > T tabel ( $2,036$ ) maka H diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan untuk P value (nilai signifikansi) diperoleh dari tabel coefficients dapat diketahui probabilitas adalah 0,015. Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,015 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima (H ditolak) yaitu komitmen berpengaruh terhadap kualitas laporan SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian silviana (2012) yaitu komitmen kepala daerah memiliki pengaruh signifikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan makin tinggi komitmen dari seorang pimpinan terhadap LKPD yang dihasilkan dari satuan SKPD maka semakin tinggi kualitas LKPD yang dihasilkan dikarenakan ada keinginan yang kuat dari kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang handal dan berkualitas juga dibantu dengan tim yang bekerja dengan baik dan berkomitmen menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### 4.5.3 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk uji T dapat diketahui bahwa T hitung ( $2,212$ ) > T tabel ( $2,0369$ ) maka  $H_a$  diterima ( $H_0$  ditolak) yaitu

pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, dan untuk P value (nilai signifikansi) dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar  $0,034 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima ( $H_a$  ditolak) yaitu pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh.
2. Komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh.
3. Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh.

### 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya mampu menjelaskan 3,91% faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sedangkan 96,09% yaitu faktor lain diluar penelitian ini belum bisa dijelaskan.
- 2) Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan responden sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.
- 3) Kesulitan bagi peneliti untuk membuat kuesioner sendiri. Hal ini disebabkan karena peneliti kesulitan untuk membuat kuesioner yang tepat, sehingga peneliti memodifikasi kuesioner dari peneliti terdahulu.

### 5.3 Saran

Bagi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini kualitas laporan keuangan SKPD hanya ditinjau dari aspek komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa

variabel independen lain sehingga dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian selain kuesioner, seperti metode wawancara yang dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan responden dan mendapatkan kejujuran jawaban dari responden.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah Aceh, khususnya kepala daerah di Provinsi Aceh walaupun komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD diharapkan dapat meningkatkan komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi yang akan menghasilkan kualitas laporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh yang berkualitas sehingga akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

- Adhi Kartika Danniell, Suhardjo Yohanes, 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal Stie Semarang, Vol 5, No 3, (Issn : 2252-7826).
- Amitai Etzioni, 1961. *A Comparative Analysis of Complex Organizations*. New York: The Free Press
- Diani Irma Dian, 2009. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah*. Sekripsi Universitas Negeri Padang.
- Fontenella, Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 5: 20-30
- Halim Abdullah, 2007. *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFPE.

- Jogiyanto, H.M. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kerlinger, F.M. 2000. *Asas-asas penelitian behavioral*. Edisi 3. Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 Tentang Akuntansi Pemerintahan.
- Kurniawan Selamat. 2011. *BPK RI Beri Opini WDP terhadap LKPD Enam Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar*. Siaran Pers Penyerahan LHP-LKPD TA 2010. Juli 2011. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Masmudi. 2003. *Laporan keuangan Sektor Publik antara Konsep dan Praktek*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume nomor I.
- Mayangsari Dewi, Cut, 2009. *Pengaruh Komitmen Organisasi Gaya Kepemimpinan Job Relevant Information Dan Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Emperis Pada SKPD Kota Banda Aceh)*. Tesis Universitas Syiah Kuala
- Nordiwana. D, Putra.S.I, Rahmawati.M. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat
- Praningrum. 2002. *Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Dya Manusia (SDM) terhadap Komitmen Pimpinan pada Kinerja Rumah Sakit Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. 7.3: 158-168.
- Putri, Natalie D. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tegal*. Skripsi. Universitas Semarang.
- Porter, L. W, Steers, R. M, Mowday, R. T, and Boulivan, P. V. 1974. *Organization Commitment, Job Satisfication, and Turnover Among Psychiatric Technicians*. Journal of Apllied Psychology 59 (5); 603-9.
- Pasaribu, Hiras. 2009. *Pengaruh Komitmen, Persepsi dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial (Survei pada BUMN Manufaktur di Indonesia)*. Jurnal UPN. Veteran. 11. 2: 65-75.
- Purmadi Dwi Angga. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Silviana. 2012. *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Universitas Widyatmata:862-869.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumani, Murti & Salamag Wahyuni.2006.*metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- Standa Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2007
- Syafri Adnan Baharuddin. 2011. *Peran Hasil Audit BPK dalam Memberikan Keyakinan atas Penyajian Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan*. Materi disampaikan pada RA Ke-5 IAI-KASP Juli 2011.
- Soemarso, S. R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba empat.
- Setyawati. 2007. *Perbedaan Komitmen Kerja Berdasarkan Orientasi Peran Gender pada Karyawan di Bidang Kerja Tradisional*. Jurnal Universitas Gunadarma,2: 1858-2559.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen*. Edis Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- McDaniel. Linda, Roger D Mrtin and laureen A. Maines. 2002. *Evaluating Financial Reporting Quality*. Accounting Reiview. December 1.
- Jogiyanto, H.M 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

- Silviana. 2012. *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Universitas Widyatmata:862-869.
- Taufik, Muhammad. Darwanis, arfan Muhammad. 2014. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode Opini WDP dan Periode Opini WDP (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012)*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala:104-113.
- Trihartono . 2006. *Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilai Kinerja Manajemen Kantor Cabang*. Universitas Dipenogoro.
- Yuliani Safrida, Nadirsyah, Bakar Usman. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2. Hal. 206-220
- Zabihollah Rezaee. 2004. *The Six Langed Stool*. Strategic. February
- Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.